

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2005-2009 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; ***Pertama***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. ***Kedua***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. ***Ketiga***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar

negeri. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2005 – 2009.

3.1.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2008-2009 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten.
3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

5. Mengadakan pertemuan dengan *Dealer* Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha *Show Room* kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.
6. Membentuk Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
8. Melakukan penagihan *door to door* kepada masyarakat wajib pajak yang menunggak melalui "Samsat Batandang" dengan sistem petugas berkunjung ketempat pemilik kendaraan, khususnya di daerah pelosok.
9. Membangun *Drive Through* yang lokasinya di Samsat Kota Jambi dan WTC Batanghari, dengan cara wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dalam membayar pajaknya, cukup dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. *Drive Through* ini melayani pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu penyelesaian pengurusan lebih kurang 5 menit.
10. Melaksanakan kursus/diklat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000, yang diikuti oleh petugas Samsat Kota Jambi dan dari perwakilan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh PT. Point Development International dan telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000 dari Badan Sertifikasi Nasional dan diakui sebagai mutu standar pelayanan prima.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak dan retribusi daerah selama tahun 2005-2009.

A. Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Dinas Pendapatan Provinsi Jambi. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Provinsi Jambi adalah melalui pemungutan pajak.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil Provinsi, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Tabel 3.1
**Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2005-2009 (Rp)**

Tahun	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Persentase Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2005	607.839.485.129	751.777.866.451	123,68	
2006	894.925.322.433	1.010.116.940.976	112,87	34,36
2007	1.043.015.234.637	1.155.350.577.267	110,77	14,38
2008	1.261.469.134.073	1.436.796.231.072	113,90	24,36
2009	1.292.670.700.746	1.353.900.464.684	104,74	-5,77
GR (%)	20,76	15,84		

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Dari sisi Pendapatan Daerah selama tahun 2005-2009 tingkat realisasi rata-rata mencapai 113,19 persen, namun dari sisi pertumbuhan realisasi pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 5,77 persen dan secara rata-rata pertumbuhan realisasi selama periode 2005-2009 sebesar 15,84 persen.

1). Pendapatan Asli Daerah

Persentase realisasi Penerimaan PAD selama tahun 2005-2009 rata-rata sebesar 119,73 persen dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 10,92 persen. Pertumbuhan PAD pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 15,97 persen dengan tingkat realisasi sebesar 105,68 persen. Penurunan PAD pada tahun 2009 disebabkan oleh penurunan

pajak kendaraan bermotor sebesar 16,79 persen atau terjadi penurunan sebesar Rp 88,5 milyar.

Tabel 3.2
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2005-2009 (Rp)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Pert. Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2005	283.589.737.270	347.837.812.858	122,66	
2006	336.590.283.408	385.042.832.574	114,40	10,70
2007	382.082.234.637	451.050.873.390	118,05	17,14
2008	454.441.987.273	626.524.989.694	137,87	38,90
2009	498.167.990.389	526.442.077.651	105,68	-15,97
GR (%)	15,13	10,92		

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, diantaranya melakukan pendaftaran dan pendataan kembali subyek dan obyek pajak, penetapan dan penyuluhan pajak atau retribusi, melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, pemantauan, evaluasi dan mengkaji ulang terhadap kelayakan tariff pajak dan retribusi dengan kondisi sekarang, serta memberikan teguran terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak.

2). Dana Perimbangan

Dari perkembangan dana perimbangan Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 rata-rata persentase realisasi mencapai 111,30 persen dengan tingkat pertumbuhan realisasi sebesar 19,47 persen pertahun. Persentase realisasi dana perimbangan pada tahun 2008 hanya sebesar 99,67 persen, namun pertumbuhan realisasi mencapai 8,64 persen.

Tabel 3.3
Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Jambi
Tahun 2005-2009 (Rp)

Tahun	Target	Realisasi	persentase Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2005	311.479.747.859	393.688.551.000	126,39	
2006	532.035.039.025	625.074.108.402	117,49	58,77
2007	631.433.000.000	686.556.648.877	108,73	9,84
2008	748.327.682.000	745.860.901.379	99,67	8,64
2009	769.453.510.357	802.060.279.933	104,24	7,53
GR (%)	25,37	19,47		

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Ketergantungan APBD Provinsi Jambi terhadap dana perimbangan pada tahun 2005-2009 masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 56,97 persen. Kontribusi terbesar dana perimbangan pada APBD terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 61,88 persen dan yang terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 51,91 persen. Sementara itu kontribusi terbesar dari dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

3). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Kontribusi perkembangan lain-lain pendapatan yang sah terhadap APBD Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi yang relatif besar. Demikian juga persentase realisasi cukup fluktuatif dan hanya mencapai rata-rata 70,31 persen, namun dari pertumbuhan realisasi selama periode 2005-2009 yaitu sebesar 25,46 persen pertahun.

Tabel 3.4
**Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
 Provinsi Jambi Tahun 2005-2009 (Rp)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Pert. Realisasi
1	2	3	4	5
2005	12.770.000.000	10.251.501.000	80,28	
2006	26.300.000.000	0	0,00	-100,00
2007	29.500.000.000	17.743.055.000	60,15	0
2008	58.699.464.800	64.410.339.999	109,73	263,02
2009	25.049.200.000	25.398.107.100	101,39	-60,57
GR (%)	18,35	25,46		

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Sumber penerimaan pos Lain-lain pendapatan yang sah Provinsi Jambi berasal dari dana darurat seperti dana penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah, yang merupakan penerimaan dari pemerintah pusat sebagai dana penyeimbang dan penyesuaian pada tahun 2005, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 12.770.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 10.251.501.000 atau sekitar 80,28 persen. Pada tahun 2006 target lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 26.300.000.000 tidak terealisasi sama sekali, namun pada tahun anggaran 2009, realisasinya sebesar Rp. 25.398.107.100.- atau terealisasi sebesar 101,39 persen.

B. Proporsi Sumber Pendapatan

Pada tabel berikut dapat dilihat potret kinerja APBD Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 dari sisi pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Provinsi jambi pada tahun 2005 mencapai 46,27 persen, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2009 hanya sebesar 38,88 persen. Penurunan dari kontribusi PAD ini disebabkan oleh penurunan kontribusi dari pendapatan pajak daerah yaitu dari 37,47 persen tahun 2005

menjadi 32,39 persen tahun 2009. Dari persentase sumber pendapatan daerah tersebut terlihat bahwa PAD Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 sangat tergantung pada pendapatan pajak daerah. Sedangkan kontribusi hasil retribusi daerah pada tahun 2005 hanya sebesar 2,22 persen dan tahun 2009 sebesar 2,72 persen. Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan dari 5,03 persen tahun 2006 menurun menjadi 3,07 persen tahun 2009.

Tabel 3.5
**Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2005-2009**

Uraian	Tahun Anggaran					Rerata (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH (Rp Juta)	751.778	1.010.117	1.155.351	1.436.796	1.353.900	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (%)	46,27	38,12	39,04	43,61	38,88	41,18
Pendapatan Pajak Daerah (%)	37,47	30,80	32,31	36,68	32,39	33,93
Hasil Retribusi Daerah (%)	2,22	2,01	1,98	1,90	2,72	2,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)	0,00	0,27	0,42	0,44	0,71	0,37
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)	0,00	5,03	4,34	4,59	3,07	3,41
DANA PERIMBANGAN (%)	52,37	61,88	59,42	51,91	59,24	56,97
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (%)	19,96	24,82	23,50	17,58	21,67	21,51
Dana Alokasi Umum (%)	32,41	37,06	35,92	32,63	34,97	34,60
Dana Alokasi Khusus (%)	0,00	0,00	0,00	1,70	2,59	0,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (%)	1,36	0,00	1,54	4,48	1,88	1,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (%)	0,97	0,00	1,54	4,13	1,77	1,68
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (%)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10
Tunjangan Pendidikan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Dana Darurat (%)	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,07
TOTAL PENDAPATAN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Biro Keuangan, 2010 (Data diolah)

Jika dilihat dari dana perimbangan kontribusinya terus mengalami peningkatan yaitu dari 52,37 persen tahun 2005 meningkat menjadi 59,24 persen tahun 2009. Peningkatan ini berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil

bukan pajak yaitu dari 19,96 persen tahun 2005 meningkat menjadi 21,67 persen tahun 2009. Demikian juga dana alokasi umum (DAU) kontribusinya juga meningkat dari 32,41 persen tahun 2005 mdenjadi 34,97 persen tahun 2009. Sedangkan dana alokasi khusus mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 1,54 persen tahun 2007 menjadi 1,77 persen tahun 2009. Kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 1,36 persen tahun 2005 meningkat menjadi 1,88 persen tahun 2009. Gambaran dari potret kinerja APBD Provinsi Jambi tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Provinsi Jambi terhadap pembiayaan dari pusat terus meningkat. Hal ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

C. Realisasi Belanja

Kontribusi belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan dari 40,90 persen tahun 2005 meningkat menjadi 44,78 persen tahun 2009. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi belanja pegawai dari 20,83 persen tahun 2005 meningkat menjadi 21,31 persen tahun 2009 atau secara rata-rata belanja pegawai selama kurun waktu 2005-2009 mencapai 19,37 persen. Belanja bantuan sosial juga meningkat dari 0,29 persen tahun 2007 meningkat menjadi 1,45 persen tahun 2009. Demikian juga belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 6,74 persen tahun 2005 menjadi 9,49 persen tahun 2009. Peningkatan bantuan ini menunjukkan tanggungjawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung terus meningkat.

Tabel 3.6
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi
 Tahun 2005-2009**

Uraian Belanja	Tahun Anggaran					Rerata (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG	40,90	31,24	29,57	36,42	44,78	36,58
Belanja Pegawai	20,83	16,53	17,08	21,11	21,31	19,37
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	0,20
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,26	0,49	0,15
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,29	0,23	1,45	0,40
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	13,33	14,18	11,33	14,15	11,30	12,85
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerin-tahan Desa	6,74	0,51	0,59	0,23	9,49	3,51
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,02	0,28	0,02	0,17	0,10
BELANJA LANGSUNG	59,10	68,76	70,43	63,58	55,22	63,42
Belanja Pegawai	2,56	1,45	6,15	3,90	3,33	3,48
Belanja Barang dan Jasa	20,59	29,53	26,07	19,81	22,76	23,75
Belanja Modal	35,95	37,78	38,22	39,88	29,13	36,19
TOTAL BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Biro Keuangan, 2010 (Data diolah)

Dari sisi realisasi belanja langsung, kontribusinya mengalami fluktuasi yaitu dari 59,10 persen tahun 2005, meningkat menjadi 70,43 persen tahun 2007 dan kembali turun menjadi 55,22 persen tahun 2009. Penurunan belanja langsung ini terutama didorong oleh penurunan belanja modal yang juga berfluktuasi yaitu dari 35,95 persen tahun 2005 meningkat terus menjadi 39,88 persen tahun 2008 kemudian menurun menjadi 29,13 persen tahun 2009. Namun untuk belanja barang dan jasa relatif meningkat dari 20,59 persen tahun 2005 menjadi 22,76 persen tahun 2009. Demikian juga untuk belanja pegawai dari belanja langsung meningkat dari 2,56 persen tahun 2005 menjadi 3,33 persen tahun 2009 atau secara rata-rata belanja pegawai dari belanja langsung mencapai 3,48 persen. Bila dijumlahkan belanja pegawai dari belanja tidak langsung, maka belanja pegawai rata-rata selama tahun 2005-2009 mencapai 23,85 persen. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja, komponen dari belanja tidak langsung relatif besar terutama yang berasal dari belanja pegawai. Oleh karena itu kinerja APBD

Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.

3.1.3. Neraca Keuangan

Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2007 meningkat sebesar 17,19 persen, pada tahun 2008 tumbuh sebesar 3,50 persen, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 43,56 persen. Dengan demikian aset lancar selama tahun 2006-2009 mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,75 persen, dimana pada tahun 2006 jumlah aset lancar mencapai Rp 330,639,875,475 namun pada 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 226,352,378,884.

Penurunan aset lancar ini salah satu disebabkan oleh berkurangnya kas dari Rp 322,809,820,272 pada tahun 2006 menurun menjadi Rp 207,028,170,969 atau turun rata-rata sebesar 13,64 persen pertahun. Demikian juga dengan investasi jangka pendek dari Rp 92,500,000,000 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 167,500,000,000 pada tahun 2008, namun pada 2009 Investasi jangka pendek ini sudah tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Investasi ini biasa diarahkan pada deposito jangka pendek maksimal 3 bulan, dengan memanfaatkan dana yang masih menganggur. Sedangkan untuk piutang, piutang lain-lain dan persediaan mengalami peningkatan selama tahun 2006-2009 masing-masing yaitu 58,56 persen, 18,70 persen dan 20,27 persen.

Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 50,34 persen, investasi ini didorong oleh investasi permanen sebesar 32,44 persen dan investasi non permanen sebesar 43,31 persen. Investasi ini ditempatkan di beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinalai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 juga mengalami

peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 22,34 persen, tahun 2008 sebesar 22,40 persen dan tahun 2009 sebesar 22,19 persen, sehingga secara rata-rata aset tetap tumbuh sebesar 22,07 persen selama tahun 2006-2009. Total aset tetap Provinsi Jambi pada tahun 2006 Rp 2,029,252,466,400 meningkat menjadi Rp 3,713,109,244,989 pada tahun 2009. Kontribusi terbesar dari aset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp 1,344,855,704,461 atau 66,27 persen kontribusinya pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 2,168,274,274,877 atau 58,40 persen pada tahun 2009. Kontribusi terbesar kedua adalah tanah yaitu dari 10,71 persen tahun 2006 meningkat menjadi 25,48 persen pada tahun 2009. Kemudian gedung dan bangunan dari 10,86 persen tahun 2006 menurun menjadi 8,28 persen pada tahun 2009. Penurunan kontribusi gedung dan bangunan ini disebabkan ada beberapa asset Pemerintah Provinsi yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota seperti asset gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi ada yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi, disamping itu gedung dan bangunan ini nilainya juga mengalami penyusutan. Demikian juga untuk peralatan dan mesin dimana pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 9,56 persen menurun menjadi 6,63 persen pada tahun 2009. Walaupun kontribusi dari peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menurun namun nilainya nominalnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 8,17 persen dan 11,64 persen selama tahun 2006-2009.

Tabel 3.7
**Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
 Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2009**

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR					
1.1.1	Kas	322,809,820,272	269,268,618,654	225,556,364,225	207,028,170,969	-13.64
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0	92,500,000,000	167,500,000,000	0	81.08
1.1.3	Piutang	2,491,120,706	732,367,627	342,266,678	10,071,225,983	58.56
1.1.4	Piutang Lain-lain	1,283,431,806	22,043,622,804	3,086,548,151	2,157,475,284	18.70
1.1.5	Persediaan	4,055,502,692	2,926,053,204	4,552,240,557	7,095,506,648	20.27
	JUMLAH ASET LANCAR	330,639,875,475	387,470,662,288	401,037,419,610	226,352,378,884	-11.75
	PERT.ASET LANCAR (%)		17.19	3.50	-43.56	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1	Investasi Non Permanen	0	17,734,464,500	19,985,727,500	36,425,017,784	43.31
1.2.2	Investasi Permanen	33,187,500,000	34,187,500,000	57,366,461,984	77,754,070,783	32.44
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	33,187,500,000	51,921,964,500	77,352,189,484	114,179,088,567	50.34
	PERT. INVESTASI J PANJANG (%)		56.45	48.98	47.61	
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	217,301,919,525	219,017,458,525	219,517,458,525	945,966,334,200	62.48
1.3.2	Peralatan dan Mesin	193,935,289,746	242,416,148,408	302,719,661,190	246,021,060,802	8.17
1.3.3	Gedung dan Bangunan	220,354,718,784	306,825,223,242	388,701,501,453	307,613,758,296	11.64
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,344,855,704,461	1,597,572,548,090	1,982,887,624,571	2,168,274,274,877	17.07
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	24,816,087,885	28,836,809,942	39,333,097,287	9,433,925,976	-27.32
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27,988,746,000	87,903,888,765	105,537,133,660	35,799,890,838	8.46
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0	
	JUMLAH ASET TETAP	2,029,252,466,400	2,482,572,076,971	3,038,696,476,685	3,713,109,244,989	22.07
	PERT. ASET TETAP (%)		22.34	22.40	22.19	

Lanjutan Neraca Aset

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.4	DANA CADANGAN					
1.4.1	Dana Cadangan	0	0	0	0	
JUMLAH DANA CADANGAN		0	0	0	0	
1.5	ASET LAINNYA					
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	530,248,080	0	0	0	-100.00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24,534,464,500	6,800,000,000	20,786,560,000	34,507,656,000	11.91
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	96,900,000	
1.5.5	Aset Lain-lain	6,920,511,838	0	2,441,865,639	260,096,680,470	230.94
JUMLAH ASET LAINNYA		31,985,224,418	6,800,000,000	23,228,425,639	294,701,236,470	108.10
PERT. ASET LAINNYA			-78,74	241,59	1.168,71	
JUMLAH ASET DAERAH		2,425,065,066,294	2,928,764,703,760	3,540,314,511,419	4,348,341,948,910	21.25
PERT. ASET (%)			20.77	20.88	22.82	

Sumber : Biro Keuangan, 2010

Hutang jangka pendek dalam neraca keuangan pemerintah Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari Rp 20,139,868,989 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 44,980,772,358 atau tumbuh rata-rata sebesar 30,36 persen pertahun selama 2006-2009. Munculnya hutang jangka pendek ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban jangka pendek yaitu dari Rp 30,372,807,207 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 44,980,772,358 tahun 2009 atau meningkat rata-rata sebesar 13,84 persen. Perbedaan antara hutang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2006 disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempunyai Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 10,232,938,218, sehingga secara total kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2006 menjadi Rp 30,372,807,207. Namun sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi Jambi tidak mempunyai utang perhitungan pihak ketiga (PFK), sehingga total utang jangka pendek sama dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan hutang jangka panjang Pemerintah Provinsi Jambi tidak ada, sehingga kewajiban jangka panjang sampai tahun 2009 tidak ada. Dengan demikian dari perhitungan kewajiban jangka pendek tersebut sama jumlahnya dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi yaitu tumbuh sebesar 38,49 persen pada tahun 2007, kemudian tumbuh 9,03 persen pada tahun 2008 dan menurun sebesar 1,92 persen pada tahun 2009, sehingga secara rata-rata total kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi tumbuh rata-rata sebesar 13,84 persen pertahun selama 2006-2009.

Tabel 3.8
Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2009

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10,232,938,218	0	0	0	-100.00
2.1.2	Utang Bunga	0	0	0	0	
2.1.3	Utang Pajak	0	0	0	0	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	20,139,868,989	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	30.36
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30,372,807,207	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	13.84
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)		38.49	9.03	-1.92	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	
2.2.2	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN	30,372,807,207	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	13.84
	PERT. KEWAJIBAN (%)		38.49	9.03	-1.92	

Sumber : Biro Keuangan, 2010

Perkembangan ekuitas dana Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 tumbuh rata-rata sebesar 21,34 persen pertahun, dimana pada tahun 2007 tumbuh sebesar 20,55 persen, tahun 2008 sebesar 21,05 persen dan tahun 2009 sebesar 23,15 persen. Pertumbuhan ini didorong ekuitas dana investasi pada tahun 2007 sebesar 21,34 persen, tahun 2008 sebesar 23,53 persen dan tahun 2009 sebesar 23,15 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana investasi tumbuh sebesar 25,04 persen pertahun selama 2006-2009. Sedangkan untuk ekuitas dana lancar pada tahun 2007 tumbuh 15,03 persen, tahun 2008 sebesar 2,83 persen dan tahun hanya sebesar 48,93 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana lancar menurun sebesar 15,33 persen. Penurunan ini didorong Silpa dari Rp 312,576,882,054 tahun 2006 menurun menjadi Rp 201,204,876,815 tahun 2009 atau turun rata-rata sebesar 13,53 persen pertahun. Ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah Silpa ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditangguhkan, sehingga tahun 2006 jumlah ekuitas dana lancar mencapai Rp 300,267,068,268 dan tahun 2009 sebesar Rp 181,371,606,526. Sedangkan pertumbuhan ekuitas dana investasi didorong oleh investasi dalam jangka panjang, investasi dalam asset tetap dan investasi dalam asset lain masing tumbuh rata-rata sebesar 50,34 persen, 22,07 persen dan 108,10 persen pertahun selama periode 2006-2009.

Disisi lain ekuitas dana cadangan dari tahun 2006 sampai tahun 2009 tidak ada, karena tidak ada investasi dalam bentuk dana cadangan. Dengan demikian secara total jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2006 mencapai Rp 2,425,065,066,294 dan tahun 2009 sebesar Rp 4,348,341,948,910 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 21,25 persen pertahun selama 2006--2009. Pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2007 sebesar 20,77 persen, tahun 2008 sebesar 20,88 persen dan tahun 2009 sebesar 22,82 persen.

Tabel 3.9
Neraca Keuangan Ekuitas Dana Daerah Provinsi Jambi
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2009

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	EKUITAS DANA					
3.1	EKUITAS DANA LANCAR					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	312,576,882,054	359,528,816,370	386,301,604,937	201,204,876,815	-13.53
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	3,774,552,512	22,775,990,431	3,428,814,829	12,228,701,267	47.39
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	4,055,502,692	2,926,053,204	4,552,240,557	7,095,506,648	20.27
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-20,139,868,989	-42,064,208,247	-45,860,644,614	-44,980,772,358	30.36
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	2,239,802,284	6,754,759,288	5,823,294,154	61.24
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	300,267,068,268	345,406,454,042	355,176,774,996	181,371,606,526	-15.33
	PERT. EKUITAS DANA LANCAR (%)		15.03	2.83	-48.93	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI					
3.2.1	Diinvestasikan dlm Investasi Jk.Panjang	33,187,500,000	51,921,964,500	77,352,189,484	114,179,088,567	50.34
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,029,252,466,400	2,482,572,076,971	3,038,696,476,685	3,713,109,244,989	22.07
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	31,985,224,418	6,800,000,000	23,228,425,639	294,701,236,470	108.10
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,094,425,190,818	2,541,294,041,471	3,139,277,091,808	4,121,989,570,027	25.04
	PERT. EKUITAS DANA INVESTASI (%)		21.34	23.53	31.30	
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN					
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA	2,394,692,259,087	2,886,700,495,513	3,494,453,866,805	4,303,361,176,552	21.34
	PERT. EKUITAS DANA (%)		20.55	21.05	23.15	
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	2,425,065,066,294	2,928,764,703,760	3,540,314,511,419	4,348,341,948,910	21.25
	PERT. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (%)		20.77	20.88	22.82	

Sumber : Biro Keuangan

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
**Rasio Likuiditas Neraca Keuangan
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2006-2009**

Uraian	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
Rasio Likuiditas				
1. Rasio Lancar	10.89	9.21	8.74	5.03
2. Quick Ratio	10.75	9.14	8.65	4.87

Sumber: Hasil Pengolahan (2010)

a. Rasio Lancar (Current ratio)

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006 sebesar 10,89, tahun 2007 sebesar 9,21, tahun 2008 sebesar 8,74 dan tahun 2009 sebesar 5,03. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

Provinsi Jambi dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari trend nilai rasio lancar tersebut cenderung terus menurun dan tahun 2009 sudah mendekati angka 4,0. Oleh karena itu kedepan Pemerintah Provinsi Jambi, harus mulai hati-hati dalam mengelola asset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek.

b. Quick Ratio

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka quick ratio yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya quick ratio yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006 sebesar 10,75, tahun 2007 sebesar 9,14, tahun 2008 sebesar 8,65 dan tahun 2009 sebesar 4,87. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Provinsi Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun nilai dari quick ratio menunjukkan kecendrungan yang menurun, sehingga kedepan perlu pengelolaan asset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap equitas adalah kewajiban dibagi dengan

ekuitas. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006-2009 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
**Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2006-2009**

Uraian	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
Rasio Solvabilitas				
1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset	0.0127	0.0146	0.0131	0.0105
2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0.0127	0.0146	0.0131	0.0105

Sumber: Hasil Pengolahan (2010).

a. Rasio Kewajiban Terhadap Asset

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,0127, tahun 2007 sebesar 0,0146, tahun 2008 sebesar 0,0131 dan tahun 2009 sebesar 0,0105. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap asset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman kekreditor.

b. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,0127, tahun 2007 sebesar 0,0146, tahun 2008 sebesar 0,0131 dan tahun 2009 sebesar 0,0105. Nilai rasio ini persis sama

dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas (lihat table sebelumnya). Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
**Rasio Aktivitas Neraca Keuangan
 Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2006-2009**

Keterangan	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
Rasio Aktivitas				
1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang	85.52	11.82	65.78	16.93
2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	4.59	3.97	7.37	12.51

Sumber: Hasil Pengolahan (2010).

a. Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio tersebut menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 85,52, tahun 2007 sebesar 11,82, tahun 2008 sebesar 65,78 dan tahun 2009 sebesar 16,93. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 relatif berfluktuasi, namun cenderung menurun.

b. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Nilai Rasio rata-rata 4,59 artinya Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2009 memiliki jumlah perputaran persediaan sebesar 4,59 kali dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relative rendah dan dapat mengganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relative besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 4.59, tahun 2007 sebesar 3,97, tahun 2008 sebesar 7,37

dan tahun 2009 sebesar 12,51. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2006-2009 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

Tabel 3.13
Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005-2009

Kode Rek	Uraian	Tahun Anggaran				GR (%)
		2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR					
1.1.1	Kas	322,809,820,272	269,268,618,654	225,556,364,225	207,028,170,969	-13.64
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0	92,500,000,000	167,500,000,000	0	81.08
1.1.3	Piutang	2,491,120,706	732,367,627	342,266,678	10,071,225,983	58.56
1.1.4	Piutang Lain-lain	1,283,431,806	22,043,622,804	3,086,548,151	2,157,475,284	18.70
1.1.5	Persediaan	4,055,502,692	2,926,053,204	4,552,240,557	7,095,506,648	20.27
	JUMLAH ASET LANCAR	330,639,875,475	387,470,662,288	401,037,419,610	226,352,378,884	-11.75
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1	Investasi Non Permanen	0	17,734,464,500	19,985,727,500	36,425,017,784	43.31
1.2.2	Investasi Permanen	33,187,500,000	34,187,500,000	57,366,461,984	77,754,070,783	32.44
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	33,187,500,000	51,921,964,500	77,352,189,484	114,179,088,567	50.34
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	217,301,919,525	219,017,458,525	219,517,458,525	945,966,334,200	62.48
1.3.2	Peralatan dan Mesin	193,935,289,746	242,416,148,408	302,719,661,190	246,021,060,802	8.17
1.3.3	Gedung dan Bangunan	220,354,718,784	306,825,223,242	388,701,501,453	307,613,758,296	11.64
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,344,855,704,461	1,597,572,548,090	1,982,887,624,571	2,168,274,274,877	17.07
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	24,816,087,885	28,836,809,942	39,333,097,287	9,433,925,976	-27.32
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27,988,746,000	87,903,888,765	105,537,133,660	35,799,890,838	8.46
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0	
	JUMLAH ASET TETAP	2,029,252,466,400	2,482,572,076,971	3,038,696,476,685	3,713,109,244,989	22.07
1.4	DANA CADANGAN					
1.4.1	Dana Cadangan	0	0	0	0	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	
1.5	ASET LAINNYA					
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	530,248,080	0	0	0	-100.00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24,534,464,500	6,800,000,000	20,786,560,000	34,507,656,000	11.91
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	96,900,000	
1.5.5	Aset Lain-lain	6,920,511,838	0	2,441,865,639	260,096,680,470	230.94
	JUMLAH ASET LAINNYA	31,985,224,418	6,800,000,000	23,228,425,639	294,701,236,470	108.10
	JUMLAH ASET	2,425,065,066,294	2,928,764,703,760	3,540,314,511,419	4,348,341,948,910	21.25

Sumber: Biro Keuangan, 2010

Ket: GR = Pertumbuhan rata-rata (%)

Kode Rek.	Uraian	Tahun Anggaran				GR (%)
		2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
2	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10,232,938,218	0	0	0	
2.1.2	Utang Bunga	0	0	0	0	
2.1.3	Utang Pajak	0	0	0	0	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	20,139,868,989	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	30.36
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30,372,807,207	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	13.84
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	
2.2.2	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN	30,372,807,207	42,064,208,247	45,860,644,614	44,980,772,358	13.84

Sumber: Biro Keuangan, 2010

Ket: GR = Pertumbuhan rata-rata (%)

Kode Rek.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	EKUITAS DANA					
3.1	EKUITAS DANA LANCAR					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	312,576,882,054	359,528,816,370	386,301,604,937	201,204,876,815	-13.53
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	3,774,552,512	22,775,990,431	3,428,814,829	12,228,701,267	47.39
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	4,055,502,692	2,926,053,204	4,552,240,557	7,095,506,648	20.27
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-20,139,868,989	-42,064,208,247	-45,860,644,614	-44,980,772,358	30.36
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	2,239,802,284	6,754,759,288	5,823,294,154	61.24
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	300,267,068,268	345,406,454,042	355,176,774,996	181,371,606,526	-15.33
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI					
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	33,187,500,000	51,921,964,500	77,352,189,484	114,179,088,567	50.34

3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,029,252,466,400	2,482,572,076,971	3,038,696,476,685	3,713,109,244,989	22.07
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	31,985,224,418	6,800,000,000	23,228,425,639	294,701,236,470	108.10
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2,094,425,190,818	2,541,294,041,471	3,139,277,091,808	4,121,989,570,027	25.04
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN					
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0	
	JUMLAH EKUITAS DANA	2,394,692,259,087	2,886,700,495,513	3,494,453,866,805	4,303,361,176,552	21.34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,425,065,066,294	2,928,764,703,760	3,540,314,511,419	4,348,341,948,910	21.25

Sumber: Biro Keuangan, 2010

Ket: GR = Pertumbuhan rata-rata (%)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Provinsi Jambi dari tahun 2005-2009.

Tabel 3.14
**Proporsi Belanja Anggaran Provinsi Jambi
 Tahun 2005-2009 (%)**

No	Uraian	Tahun Anggaran					Rerata (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Belanja Tidak Langsung	40.90	31.24	29.57	36.42	44.78	36.58
1.	Belanja Pegawai	20.83	16.53	17.08	21.11	21.31	19.37
2.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.43	0.57	0.20
3.	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.26	0.49	0.15
4.	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.29	0.23	1.45	0.40
5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemerintahan Desa	13.33	14.18	11.33	14.15	11.30	12.85
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemerintahan Desa	6.74	0.51	0.59	0.23	9.49	3.51
7.	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.02	0.28	0.02	0.17	0.10
B	Belanja Langsung	59.10	68.76	70.43	63.58	55.22	63.42
1	Belanja Pegawai	2.56	1.45	6.15	3.90	3.33	3.48
2	Belanja Barang Dan Jasa	20.59	29.53	26.07	19.81	22.76	23.75
3	Belanja Modal	35.95	37.78	38.22	39.88	29.13	36.19
C	Total Belanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Biro Keuangan 2009

Untuk belanja daerah alokasi dana yang tersedia untuk 2005 adalah sebesar Rp 642,84 milyar meningkat menjadi Rp 963,24 milyar tahun 2006, dan meningkat lagi menjadi Rp1,532 triliun pada tahun 2009 yang dirinci

untuk belanja tidak langsung sebesar 262,90 milyar pada tahun 2005 Rp277,85 milyar pada 2006 dan sebesar Rp686,93 milyar pada 2009. Adapun untuk belanja langsung untuk tahun yang sama masing-masing sebesar Rp 379,94 milyar pada tahun 2005 dan Rp685,39 milyar pada tahun 2006 serta Rp844,93 milyar pada tahun 2009. Jika dilihat dari proporsinya, maka anggaran belanja tidak langsung meningkat dari 40,90 persen tahun 2005 menjadi 44,78 persen tahun 2009. Peningkatan belanja tidak langsung ini didorong oleh belanja pegawai dari 20,83 persen tahun 2005 menjadi 21,31 persen tahun 2009. Demikian juga belanja subsidi, hibah dan belanja bantuan sosial meningkat, namun relatif kecil, kecuali bantuan belanja sosial dari 0 persen tahun 2005 meningkat menjadi 1,45 persen tahun 2009, demikian juga belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota meningkat dari 6,74 persen tahun 2005 menjadi 9,49 persen tahun 2009. Namun untuk belanja bagi hasil ke pemerintah yang lebih rendah menurun dari 13,33 persen menjadi 11,30 persen tahun 2009.

Disisi lain belanja langsung menurun dari 59,10 persen tahun 2005 menjadi 55,22 persen tahun 2009, penurunan ini disebabkan belanja modal juga menurun dari 35,95 persen tahun 2005 menjadi 29,13 persen tahun 2009. Namun untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa meningkat masing-masing dari 2,56 persen dan 20,59 persen tahun 2005 menjadi 3,33 persen dan 22,76 persen tahun 2009. Dari proporsi belanja ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran selama tahun 2005-2006 masih lebih besar kepada belanja aparatur deari pada belanja program. Kondisi ini kedepan harus dikoreksi, agar proporsi belanja menjadi lebih fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat alokasi anggaran untuk masing-masing sektor pada tahun 2007-2008. Berdasarkan pada data inventarisasi, ada tiga SKPD yang mempunyai anggaran diatas 10 persen yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat daerah dan Dinas Pendidikan. Pada Dinas Pendidikan tahun 2007 alokasi anggaran pendidikannya sebesar 13,32 persen, namun pada tahun 2008 alokasi anggarannya menurun menjadi 9,94 persen. Penurunan ini

terjadi pada belanja langsung pada pos belanja pegawai dari Rp 20,13 milyar tahun 2007 menurun menjadi Rp3,702 milyar pada tahun 2008. Namun Dinas Pekerjaan Umum mengalami peningkatan dari 26,62 persen tahun 2007 menjadi 30,02 persen tahun 2008. Peningkatan ini didorong oleh belanja tidak langsung yaitu pada belanja pegawai dan pada belanja langsung yaitu komponen belanja modal yaitu dari Rp 269,25 milyar tahun 2007 meningkat menjadi Rp 384,60 milyar pada tahun 2009. Demikian juga pada sekretariat daerah peningkatannya relatif tajam yaitu dari 19,39 persen tahun 2007 meningkat menjadi 22,28 persen. Peningkatan pada sekretariat daerah yaitu dari Rp 214,34 milyar tahun 2007 meningkat menjadi Rp 313,01 milyar tahun 2008 atau naik sebesar Rp 98,67 milyar. Kondisi alokasi anggaran ini mengindikasikan bahwa, pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2005-2009 belum memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja publik yaitu untuk menstimulasi ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang rusak.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2005 – 2008 terjadi surplus anggaran dan pada tahun 2009 terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran sebesar Rp 176,21 milyar untuk tahun 2009 dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp 386,30 milyar. Sumber penerimaan pembangunan selama tahun 2005-2009 sebagian besar berasal dari Silpa tahun lalu, hanya tahun 2005 dan 2006 penerimaan

pembangunannya ada yang berasal Penerimaan Kembali Penyertaan Modal dan Penerimaan kembali piutang serta Penerimaan Hutang. Pada tahun 2005 penerimaan pembangunan sebesar Rp 172,93 milyar dimana sebesar Rp 168,93 milyar berasal Silpa tahun lalu Rp 4 milyar berasal dari penerimaan kembali penyertaan modal. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan pembangunan sebesar Rp 280,699 milyar , dimana sebesar Rp 278,917 milyar berasal dari Silpa tahun lalu dan Rp 1 berasal dari penerimaan kembali penyertaan modal, kemudian Rp 641 juta berasal dari Penerimaan kembali piutang dan Rp 140 juta berasal dari penerimaan hutang. Realisasi Penerimaan pembangunan tumbuh rata-rata sebesar 22,25 persen dan Silpa tahun lalu tumbuh rata-rata sebesar 22,97 persen pertahun selama periode 2005-2009.

Tabel 3.15
**Perkembangan Pembiayaan APBD Provinsi Jambi
 Tahun 2005-2009 (Rp Jutaan)**

No	Pembiayaan	2005		2006		2007		2008		2009		Pert. (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penerimaan pembiayaan	168,955	172,930	278,917	280,699	312,577	310,525	359,488	359,488	386,302	386,302	22.25
	SilPA Tahun Lalu	168,955	168,930	278,917	278,917	312,577	310,525	359,488	359,488	386,302	386,302	22.97
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	4,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	(100.00)
	Penerimaan kembali piutang	-	-	-	641	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Hutang	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	278,917	17,000	327,577	12,000	360,488	5,000	391,302	8,924	210,629	(6.78)
	SilPA Tahun Berkenaan	-	278,917	-	312,577	-	359,488	-	386,302	-	201,705	(7.78)
	Pembentukan Dana Cadgn	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal/Invest	-	-	17,000	15,000	2,000	1,000	5,000	5,000	8,924	8,924	-
3	Pembiayaan Netto	168,955	(105,988)	261,917	(46,878)	300,577	(49,963)	354,488	(31,814)	377,378	175,672	-
4	Surplus (Defisit) Belanja	-	105,988	-	46,878	-	49,963	-	31,814	(175,672)	(175,672)	-

Sumber : Biro Keuangan

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2005-2009 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, sebagian lagi berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi dari Pemerintah Provinsi Jambi. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2005 defisit Rp 105,988 milyar, tahun 2006 sebesar Rp 46,878 milyar, tahun 2007 sebesar Rp 49,963 milyar dan tahun 2008 defisit sebesar Rp 31,814 milyar, hanya tahun 2009 pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 175,672 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Jambi selama tahun 2005-2009 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam. Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2010-2015) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan

pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jambi pada tahun 2010-2015 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, atau pada Bank Jambi.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Jambi untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jambi diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;

3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan emudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negri).
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat local.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Realisasi Belanja tidak langsung pada tahun 2005 sebesar Rp 262,899 milyar, yang terdiri dari belanja pegawai Rp 133,89 milyar, belanja bagi hasil kepada kab/kota sebesar Rp 85,661 milyar, belanja bantuan keuangan kepada kab/kota sebesar Rp 43,347 milyar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 379,937 milyar tahun 2005, pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung selama 2005-2009 sebesar 27,06 persen, belanja langsung sebesar 22,12 persen. Pengeluaran pembiayaan rata-rata mengalami penurunan sebesar 6,78 persen pertahun, hal ini disebabkan penurunan silpa tahun berkenaan yang menurun rata-rata sebesar 7,78 persen pertahun selama periode 2005-2009.

Tabel 3.16
**Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan
 Pengeluaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2005-2009**

(Rp Jutaan)

No	URAIAN	Tahun Anggaran					GR (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	262,899	300,878	326,834	511,724	685,176	27.06
1.	Belanja Pegawai	133,890	159,195	188,771	296,562	326,068	24.92
2.	Belanja Subsidi	-	-	-	5,984	8,689	45.20
3.	Belanja Hibah	-	-	-	3,593	7,438	107.04
4.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	3,249	3,283	22,223	161.54
5.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	85,661	136,563	125,190	198,770	172,866	19.19
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	43,347	4,960	6,502	3,250	145,218	35.29
7.	Belanja Tidak Terduga	-	160	3,122	283	2,675	153.31
B	BELANJA LANGSUNG	379,937	662,361	778,549	893,258	844,897	22.12
1	Belanja Pegawai	16,456	13,962	67,965	54,733	50,985	32.67
2	Belanja Barang dan Jasa	132,372	284,492	288,147	278,270	348,231	27.36
3	Belanja Modal	231,110	363,908	422,437	560,255	445,681	17.84
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	278,917	327,577	360,488	391,302	210,629	(6.78)
	- SILPA Tahun Berkenaan	278,917	312,577	359,488	386,302	201,705	(7.78)
	- Pembentukan Dana Cadngn	0	0	0	0	0	
	- Penyertaan Modal/Investasi	0	15,000	1,000	5,000	8,924	(15.75)
D	TOTAL A+B+C	921,753	1,290,816	1,465,871	1,796,284	1,740,702	17.23

Sumber : Biro Keuangan

Pengeluaran wajib untuk belanja tidak langsung, diprioritaskan untuk belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Pengeluaran wajib ini menyerap lebih dari 95 persen belanja tidak langsung, artinya kedepan pemerintah Provinsi Jambi harus mengalokasikan belanja tidak langsung minimal sebesar kebutuhan pada tahun 2009 dengan asumsi tidak relative kecil penambahan pegawai negeri. Sedangkan pengeluaran wajib untuk belanja langsung sebagian besar diserap oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal, untuk belanja pegawai pada pos pengeluaran belanja langsung masih dapat ditekan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dan biaya akomodasi lainnya.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.17
**Kerangka Pendanaan APBD
 Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Rp Jutaan)**

URAIAN	Tahun Anggaran					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Pendapatan Daerah	1,304,934	1,359,006	1,455,284	1,557,266	1,726,429	1,847,856
2. Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	200,000	100,000	90,000	81,000	72,000	65,610
3. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	706,676	551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
a. Gaji Pegawai	266,976	330,785	352,767	376,257	415,395	436,724
b. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	176,271	173,268	184,783	197,087	217,588	228,760
c. Belanja Bantuan Keu Ke Kab/Kota	29,400	47,255	50,395	53,751	59,342	62,389
5. Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama		658,681	693,747	731,219	793,654	827,678
a. Sektor Pendidikan 20%		212,648	226,779	241,879	267,040	280,751
b. Infrastruktur		315,034	335,969	358,340	395,614	415,927
c. Program Samisake	0	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
6. Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
a. Pembentukan Dana cadangan	0	0	0	0	0	0
b. Penyertaan Modal/Investasi	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 1,359 milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan guru serta pegawai honor sebesar Rp 330,785 milyar, belanja bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp 173,268 milyar dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota sebesar Rp 47,255 milyar. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan visi misi Gubernur 2010-2015 untuk mewujudkan Jambi Emas. Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD, Berkenaan dengan itu progam tersebut merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Demikian juga untuk program infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan ini juga program prioritas dan utama serta program Rp 1 milyar satu kecamatan yang disebut dengan **program samisake** merupakan program prioritas dari Gubernur yang akan dialokasikan pada tahun 2011 sebesar Rp 131 milyar sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Jambi dan dapat terjadi jumlah ini bisa meningkat untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan perkembangan pemekaran kecamatan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 diperkirakan sebesar 7,98 persen, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 7,19 persen dan pertumbuhan belanja langsung sebesar 5,88 persen, sehingga secara total belanja diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,19 persen pertahun selama periode 2010-2015.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen, kemudian pertumbuhan rata-rata penerimaan sebesar Rp 7,17 persen, sedangkan total pertumbuhan rata-rata Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 6,43 persen pertahun, sehingga pertumbuhan rata-rata Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar 9,57 persen pertahun untuk periode 2011-2015. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan relative kecil yaitu dari sebesar Rp 360,18 milyar tahun 2011 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar tahun 2015. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 393,15 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 428,39 milyar dan tahun 2014 sebesar 487,09 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau diprediksi meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2010-2015 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong program prioritas dan program utama untuk mewujudkan Jambi Emas melalui *triple track plus one* yaitu ***pro poor, pro job*** dan ***pro growth*** serta ***pro environment***.

Tabel 3.18
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 (Rp Jutaan)**

No	URAIAN	Tahun Anggaran					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		360,178	393,151	428,385	487,092	519,086
II	Total Rencana Prioritas Pengeluaran I (II.a-IIb-IIc)		265,000	285,000	325,000	370,000	400,000
II.a	Belanja langsung		923,681	978,747	1,056,219	1,163,654	1,227,678
	Dikurangi						
II.b	Belanja Langsung Periodik yg wajib dan mengikat serta prioritas utama		658,681	693,747	731,219	793,654	827,678
II.c	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta Prioritas Utama		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Sisa Kapasitas riil Kemampuan Keuangan daerah Setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)		95,178	108,151	103,385	117,092	119,086
III	Rencana Prioritas Pengeluaran II (III.a-III.b)		16,500	19,000	20,000	22,500	30,000
III.a	Belanja Tidak Langsung		567,809	606,945	647,095	714,825	757,873
	Dikurangi						
III.b	Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama		551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
	Surplus Anggaran Riil (I - II - III)		78,678	89,151	83,385	94,592	89,086

Sumber : Biro Keuangan